

Determinan Efektivitas Audit Internal BPKP dalam Pencegahan Kecurangan

Rizqi Restu Putra Ramadhan¹, Putu Prima Wulandari²

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10-07-2026

Revised: 10-08-2026

Accepted: 20-08-2026

Keywords:

Efektivitas audit internal;
Risk-Based Internal Audit;
Teknologi informasi;
Objektivitas auditor;
Pencegahan kecurangan.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penerapan audit berbasis risiko dan teknologi audit belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan efektivitas audit internal di sektor publik. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *Risk-Based Internal Audit* (RBIA), penerapan teknologi informasi, dan objektivitas auditor terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Populasi mencakup 4.633 auditor BPKP, dengan sampel minimum 87 responden berdasarkan *inverse square root method*. Data diperoleh dari 143 responden melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SEM-PLS dengan SmartPLS, meliputi evaluasi model pengukuran, model struktural, pengujian hipotesis one-tailed, dan PLSpredict.

Originalitas/Novelty: Penelitian ini menempatkan efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan sebagai konstruk yang independen dari kualitas audit. Konstruk ini dijelaskan melalui integrasi Teori Keagenan, Three Lines Model, dan Task-Technology Fit yang menekankan ketepatan sasaran pengawasan, keluasan bukti audit, dan kredibilitas penilaian auditor pada institusi dengan fungsi assurance dan pembinaan.

Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa RBIA, penerapan teknologi informasi, dan objektivitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas audit internal. Model menjelaskan 53,1% variasi efektivitas audit internal dan memiliki daya prediksi yang baik.

Implikasi: Secara teoretis, efektivitas monitoring ditentukan oleh ketepatan sasaran dan kredibilitas informasi audit, bukan oleh keberadaan fungsi pengawasan semata. Secara praktis, BPKP perlu menautkan program pengawasan tahunan pada peta risiko kecurangan, mengarahkan investasi teknologi pada penugasan yang buktinya bersifat elektronik, serta memisahkan penugasan pembinaan dari penugasan assurance atas entitas yang sama.

Research Objective: The application of risk-based auditing and audit technology has not fully addressed the persistent challenge of internal audit effectiveness in the public sector. This study examines the influence of Risk-Based Internal Audit (RBIA), the application of information technology, and auditor objectivity on the effectiveness of internal audit conducted by BPKP in preventing and detecting fraud.

Research Method: This study employs a quantitative causal approach. The population comprises 4,633 BPKP auditors, with a minimum sample size of 87 respondents determined using the inverse square root method. Data were collected from 143 respondents through a questionnaire and analyzed using SEM-PLS with SmartPLS, encompassing the evaluation of the measurement model, the structural model, one-tailed hypothesis testing, and PLSpredict.

Originality/Novelty: This study positions the effectiveness of internal audit in preventing and detecting fraud as a construct independent of audit quality. This construct is elaborated through the integration of Agency Theory, the Three Lines Model, and Task-Technology Fit, emphasizing the precision of oversight targeting, the comprehensiveness of audit evidence, and the credibility of auditor judgment within institutions that carry out both assurance and advisory functions.

Research Results: The findings indicate that RBIA, the application of information technology, and auditor objectivity each exert a significant positive influence on the effectiveness of internal audit. The model explains 53.1% of the variance in internal audit effectiveness and demonstrates strong predictive power.

Implications: Theoretically, the effectiveness of monitoring is determined by the precision of oversight targeting and the credibility of audit information, rather than by the mere existence of an oversight function. Practically, BPKP needs to align its annual oversight program with the fraud risk map, direct technology investment toward assignments involving electronic evidence, and separate advisory engagements from assurance engagements over the same entity.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license



OPEN ACCESS

Corresponding Author:

Rizqi Restu Putra Ramadhan,

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Jalan Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

rizqirprama@student.ub.ac.id

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya publik yang akuntabel menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif, terutama menghadapi ancaman kecurangan yang kian kompleks. Survei ACFE (2024) mencatat 1.921 kasus *occupational fraud* di 138 negara dengan total kerugian lebih dari USD 3,1 miliar; pada organisasi pemerintah, median kerugian per kasus mencapai USD 150.000 dengan median durasi sebelum terdeteksi selama 12 bulan. Di Indonesia, Survei Fraud Indonesia 2025 menunjukkan korupsi mendominasi kasus dengan proporsi 47,6%, dan pemerintah pusat serta daerah dipersepsikan sebagai institusi yang paling sering menjadi korban *occupational fraud* (Rahardyan et al., 2025). Selain itu, Indonesia memperoleh skor *Corruption Perceptions Index* 2025 sebesar 34 dari 100, mengindikasikan bahwa tantangan integritas sektor publik masih memerlukan perhatian serius (Transparency International, 2026).

Dalam konteks tersebut, audit internal memiliki peran strategis sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi kecurangan. The Institute of Internal Auditors (2024) mendefinisikan fungsi audit internal sebagai pemberi *assurance* yang independen, objektif, dan berbasis risiko, sekaligus penyampai nasihat dan wawasan kepada dewan dan manajemen. Pada level kelembagaan Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat khusus sebagai auditor internal pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 (Republik Indonesia, 2025). Berbeda dengan APIP pada umumnya, BPKP menjalankan fungsi ganda yaitu *assurance* sekaligus pembinaan pengawasan intern dengan cakupan pengawasan yang lintas sektor dan kompleks.

Efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, *Risk-Based Internal Audit* (RBIA) sebagai pendekatan yang mengarahkan aktivitas, sumber daya, dan cakupan audit kepada risiko-risiko utama organisasi (Lois et al., 2021). Kedua, implementasi teknologi dalam audit berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas tugas audit sehingga meningkatkan kinerja audit dan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugasnya secara lebih akurat (Jayanti et al., 2025). Ketiga, objektivitas auditor sebagai sikap mental yang tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan, yang menentukan kredibilitas temuan dan rekomendasi (The Institute of Internal Auditors, 2017).

Ketiga faktor tersebut telah lama melekat dalam praktik pengawasan BPKP, tetapi keberadaannya belum otomatis berbanding lurus dengan hasil pengawasan. Pedoman audit berbasis risiko sudah diterapkan dan sistem informasi audit sudah digunakan, sementara kasus kecurangan pada instansi pemerintah tetap bermunculan dan sebagian besar baru terungkap setelah kerugian terjadi. Kesenjangan antara instrumen yang tersedia dan hasil yang dicapai inilah yang membuat efektivitas audit internal tetap menjadi persoalan, dan kesenjangan tersebut lebih berkaitan dengan kualitas penerapan daripada dengan ketersediaan instrumen. RBIA baru bermakna apabila penilaian risiko organisasi cukup matang untuk dijadikan dasar penentuan prioritas audit (Lois et al., 2021). Teknologi audit baru produktif apabila karakteristiknya sepadan dengan tuntutan penugasan dan tidak justru menghadirkan kompleksitas baru (Han et al., 2016). Keduanya pun kehilangan arti jika auditor tidak mampu mempertahankan sikap imparial di bawah tekanan birokrasi maupun politik (Mahdi et al., 2024; Razali, 2020).

Literatur yang tersedia belum menjawab persoalan tersebut secara memadai. Pengaruh RBIA terhadap efektivitas audit telah dikonfirmasi oleh sejumlah penelitian (Ardianingsih & Payamta, 2022; Atmanegara et al., 2021; Harahap & Erlina, 2024; Mahsun et al., 2021), demikian juga pemanfaatan TI dalam audit (Alkebsi & Aziz, 2017; Alqaraleh et al., 2022; Han et al., 2016; Mokhtar et al., 2024) dan objektivitas auditor (Gamayuni, 2018; Suwaidan & Qasim, 2010). Namun, hingga kini perbedaan hasil antarpelitian jarang ditelusuri sampai ke sumber penyebabnya, sehingga kesenjangan yang tersisa tidak berhenti pada perbedaan temuan empiris.

Sebagian besar penelitian menempatkan kualitas atau kinerja audit secara umum sebagai variabel dependen, sehingga efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan hanya diteliti sebagai implikasi turunan. Padahal, audit dapat memenuhi seluruh standar mutu prosedural tanpa menghasilkan temuan yang benar-benar menutup celah penyimpangan. Selain itu, Teori Keagenan, *Three Lines Model*, dan *Task-Technology Fit* umumnya digunakan secara terpisah, padahal ketiganya menyoroti dimensi yang berbeda dan saling melengkapi, yaitu relevansi informasi pengawasan, posisi kelembagaan penyedia *assurance*, dan kesesuaian teknologi dengan tugas. Belum tersedia penjelasan yang utuh mengenai bagaimana ketiga determinan bekerja secara simultan dan determinan mana yang paling menentukan ketika seluruhnya diuji dalam satu model. BPKP menjalankan fungsi *assurance* sekaligus pembinaan dengan cakupan lintas sektor. Kombinasi kedua fungsi tersebut menumbuhkan kedekatan relasional dengan entitas yang diawasi, sehingga tekanan terhadap objektivitas bekerja dengan cara yang tidak sepenuhnya sama dengan konteks audit internal pada umumnya.

Efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan pada penelitian ini diperlakukan sebagai konstruk mandiri yang diukur melalui cakupan pemeriksaan pada area rawan, kualitas temuan dan rekomendasi, serta dampaknya bagi auditee. Konstruk tersebut kemudian dijelaskan melalui integrasi tiga kerangka teori: RBIA menentukan ke mana perhatian pengawasan diarahkan, teknologi informasi menentukan seberapa jauh pengawasan mampu menjangkau bukti, dan objektivitas auditor menentukan apakah hasil pengawasan tetap kredibel. Penelitian ini juga memperkaya analisis pada auditor BPKP sehingga kekuatan relatif ketiga determinan dapat diperbandingkan dalam satu model struktural dan hasil penelitian dapat menghasilkan perspektif baru dalam efektivitas audit internal sektor publik.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh RBIA, penerapan TI, dan objektivitas auditor terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memperluas penjelasan Teori Keagenan bahwa efektivitas monitoring tidak ditentukan oleh keberadaan fungsi pengawasan, melainkan oleh ketepatan sasaran, jangkauan bukti, dan kredibilitas informasi yang dihasilkan. Hasil penelitian juga diharapkan menajamkan *Three Lines Model* dengan menunjukkan prasyarat yang harus dipenuhi lini ketiga pada organisasi bermandat ganda, sekaligus menguji relevansi *Task-Technology Fit* pada audit pemerintahan yang selama ini lebih banyak dikaji dalam konteks organisasi bisnis. Secara praktis, temuan penelitian dapat digunakan BPKP sebagai dasar untuk menyusun prioritas penugasan berbasis peta risiko kecurangan, mengarahkan investasi teknologi audit agar sesuai dengan karakteristik penugasan, serta merancang mekanisme perlindungan objektivitas auditor, khususnya pada penugasan yang menggabungkan peran *assurance* dan pembinaan.

Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan

Teori Keagenan menjelaskan hubungan pendelegasian wewenang di mana *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas namanya. Dalam sektor publik, masyarakat selaku *principal* menghadapi asimetri informasi terhadap pemerintah selaku *agent*, yang dapat menimbulkan *moral hazard* dan kecurangan (Fitri & Khotimah, 2022). Audit internal diposisikan sebagai mekanisme *monitoring* untuk menekan masalah keagenan tersebut dengan pendekatan RBIA yang meningkatkan relevansi pengujian pada area berisiko, penerapan TI memperluas dan mempercepat pemantauan berbasis data, serta objektivitas auditor dalam memastikan informasi yang dihasilkan bebas dari bias.

Three Lines Model yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (2020) menggambarkan fungsi audit internal sebagai penyedia *assurance* yang independen dan objektif atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mekanisme tersebut menempatkan BPKP sebagai lini ketiga yang memberikan *assurance* independen dan objektif atas lini pertama (operasional) dan lini kedua (fungsi risiko dan kepatuhan). Posisi ini menegaskan bahwa efektivitas audit internal bukan sekadar kesesuaian prosedur, melainkan kualitas *assurance* yang diberikan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Task-Technology Fit (TTF) menjelaskan bahwa teknologi akan meningkatkan kinerja apabila terdapat kesesuaian antara tuntutan tugas dan karakteristik teknologi yang digunakan (Marikyan & Papagiannidis, 2023; Spies et al., 2020). Dalam konteks audit internal BPKP, TTF menjadi relevan karena tugas pengawasan pemerintahan modern yang melibatkan pengolahan data besar, penelusuran transaksi elektronik, dan identifikasi anomali menuntut dukungan teknologi yang memang dirancang untuk mendukung kebutuhan tersebut.

Ketiga kerangka tersebut digunakan secara komplementer, bukan sebagai alternatif satu sama lain. Teori Keagenan menjelaskan mengapa fungsi pengawasan dibutuhkan dan informasi seperti apa yang bernilai bagi *principal*. *Three Lines Model* menjelaskan posisi kelembagaan yang membuat *assurance* memiliki bobot, sedangkan *Task-Technology Fit* menjelaskan syarat teknis agar pengawasan mampu menjangkau bukti yang relevan. Kombinasi ketiganya menempatkan RBIA, penerapan teknologi informasi, dan objektivitas auditor sebagai tiga syarat yang berbeda sifatnya dan harus terpenuhi secara bersamaan: RBIA menentukan ketepatan sasaran, teknologi menentukan jangkauan pengujian, dan objektivitas menentukan kredibilitas hasil. Kerangka inilah yang mendasari perumusan ketiga hipotesis berikut.

Pengaruh RBIA terhadap Efektivitas Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

RBIA didefinisikan sebagai pendekatan audit yang mendasarkan penentuan profil risiko, penyusunan rencana audit, dan alokasi sumber daya pada tingkat risiko organisasi (Ardianingsih & Payamta, 2022). Pendekatan

ini mengarahkan aktivitas audit pada area yang memiliki eksposur risiko lebih tinggi dengan memanfaatkan output manajemen risiko sebagai dasar penentuan prioritas audit. Harahap & Erlina (2024) menemukan bahwa implementasi RBIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan deteksi kecurangan. Temuan serupa ditunjukkan oleh Atmanegara et al. (2021) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko dan audit internal berbasis risiko berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Dalam perspektif Teori Keagenan, RBIA memperkuat *monitoring* karena audit dipusatkan pada risiko material yang paling berpotensi mengganggu tujuan organisasi, sehingga informasi audit menjadi lebih relevan bagi *principal*. Dalam kerangka *Three Lines Model*, RBIA membuat fungsi *assurance* lini ketiga lebih bermakna karena rencana audit terintegrasi dengan peta risiko organisasi. Namun, efektivitas RBIA tetap dipengaruhi oleh kualitas penilaian risiko, tingkat kematangan manajemen risiko, dan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko.

Pada tahap perencanaan, penggunaan *risk register* dan *audit universe* mengubah dasar penentuan objek audit menjadi tingkat eksposur risiko, sehingga area yang paling rawan penyimpangan memperoleh porsi pengujian yang lebih besar. Pada tahap pelaksanaan, program kerja disusun mengikuti karakteristik risiko yang telah teridentifikasi, sehingga pengujian terarah pada titik lemah pengendalian yang lazim dimanfaatkan pelaku kecurangan. Pada tahap pelaporan, temuan dikaitkan dengan risiko strategis organisasi sehingga rekomendasi lebih berpeluang memperoleh perhatian dan tindak lanjut manajemen. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa RBIA meningkatkan efektivitas melalui ketepatan sasaran pengawasan, bukan melalui penambahan volume pemeriksaan. Karena itu, efektivitas RBIA tetap bergantung pada kualitas penilaian risiko dan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi yang diawasi. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis:

H1: RBIA berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan.

Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

Penerapan TI dalam audit internal menggambarkan pemanfaatan sistem digital, perangkat audit berbantuan komputer, infrastruktur teknologi, dan kompetensi digital auditor untuk mendukung pelaksanaan prosedur audit secara lebih efektif. Dalam konteks sektor publik, IT audit dan alat digital berperan dalam memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendukung pencegahan fraud keuangan pemerintah (Alerman, 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa adopsi TI meningkatkan efektivitas audit melalui otomasi, analitik data, dan perluasan cakupan pengujian (Alqaraleh et al., 2022; Mokhtar et al., 2024; Sofyan & Purnamasari, 2025). Penerapan TI di BPKP diwujudkan melalui *Audit Management Information System*, *e-Audit*, *data analytics*, dan CAATs (*Computer-Assisted Audit Techniques*), yang memungkinkan pelacakan bukti elektronik dan identifikasi anomali secara lebih efisien. Dalam perspektif TTF, TI akan menghasilkan kinerja optimal jika fitur dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan tugas audit (Marikyan & Papagiannidis, 2023). Namun, penerapan TI tidak selalu menghasilkan manfaat audit secara otomatis. Han et al. (2016) menunjukkan bahwa TI memiliki dua sisi yaitu di satu sisi dapat memperkuat efektivitas operasi dan pengendalian, tetapi di sisi lain kompleksitas TI dapat menimbulkan risiko baru bagi proses audit. Oleh karena itu, manfaat TI dalam audit internal akan lebih optimal apabila didukung oleh kualitas data, infrastruktur yang memadai, serta kompetensi analitik auditor.

Teknologi audit memungkinkan pengujian atas seluruh populasi transaksi, penelusuran jejak digital, dan pengenalan pola yang menyimpang dari kelaziman, sehingga jenis kecurangan yang sebelumnya sulit dijangkau menjadi lebih mungkin teridentifikasi. Dalam kerangka TTF, manfaat tersebut baru terwujud jika karakteristik teknologi sepadan dan sesuai dengan tuntutan tugas. Perangkat analitik, misalnya, tidak memberi nilai tambah pada penugasan yang buktinya bersifat fisik atau memerlukan konfirmasi lapangan. Oleh sebab itu, pengaruh penerapan teknologi informasi diperkirakan positif, tetapi bersifat kondisional pada kesesuaiannya dengan karakteristik penugasan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis:

H2: Penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan.

Pengaruh Objektivitas Auditor terhadap Efektivitas Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

Objektivitas auditor didefinisikan sebagai sikap mental yang imparial, bebas dari bias, dan terhindar dari konflik kepentingan, sehingga auditor dapat menilai kondisi organisasi secara wajar (The Institute of Internal Auditors, 2017). Gamayuni (2018) menjelaskan bahwa objektivitas auditor internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas fungsi audit internal pada konteks pemerintah daerah. Dalam konteks pencegahan fraud,

independensi fungsi audit internal juga berperan penting karena dapat meningkatkan kualitas audit, yang selanjutnya memperkuat efektivitas audit internal dalam pencegahan kecurangan (Lonto et al., 2023). Namun, objektivitas auditor dapat terganggu oleh tekanan sosial, bias kognitif, dan intimidasi yang berpotensi melemahkan kemampuan auditor internal dalam membuat judgment secara objektif (Razali, 2020). Dalam kerangka Teori Keagenan, objektivitas memperkuat kredibilitas fungsi *monitoring* karena informasi audit yang bebas dari keberpihakan menurunkan asimetri informasi dan menekan perilaku oportunistik. Dalam konteks *Three Lines Model*, BPKP sebagai lini ketiga hanya dapat memberikan *assurance* yang bermakna apabila auditornya mampu mempertahankan objektivitas di tengah tekanan birokrasi dan kedekatan relasional dengan entitas yang diawasi. Suwaidan & Qasim (2010) bahkan menemukan bahwa objektivitas merupakan salah satu faktor utama dalam menilai kekuatan fungsi audit internal.

Indikasi kecurangan umumnya muncul dalam bentuk yang samar dan memerlukan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu penyimpangan layak ditindaklanjuti atau cukup diselesaikan secara administratif. Auditor yang objektif menilai indikasi tersebut sesuai dengan bukti yang tersedia, sedangkan auditor yang berada di bawah tekanan relasional atau kepentingan cenderung menurunkan bobot temuan, memilih rumusan rekomendasi yang lebih lunak, atau menyelesaikan persoalan di luar mekanisme pelaporan formal. Oleh sebab itu, objektivitas tidak menambah kemampuan teknis auditor, tetapi menentukan apakah kemampuan tersebut benar-benar digunakan untuk menghasilkan temuan yang berdampak. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3: Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan kausal guna menguji hubungan antar variabel berdasarkan hipotesis yang dirumuskan (Bougie & Sekaran, 2019; Muin, 2023). Populasi penelitian adalah seluruh auditor yang bertugas di BPKP seluruh Indonesia berjumlah 4.633 pegawai. Ukuran sampel minimum ditetapkan menggunakan *inverse square root method* pada taraf signifikansi 5% sehingga diperoleh ukuran sampel minimum 87 responden. Pengumpulan data utama berhasil memperoleh 143 responden, melampaui batas minimum yang ditetapkan. Penentuan sampel menggunakan teknik *convenience sampling* dengan mempertimbangkan karakteristik populasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada perwakilan di seluruh provinsi serta unit kerja pusat dengan pola penugasan lapangan yang berpindah-pindah, sehingga keterjangkauan responden pada satu periode pengumpulan data tidak merata dan berada di luar kendali peneliti. Selain itu, partisipasi auditor bergantung pada izin kelembagaan dan kesediaan individu, kondisi yang lazim membatasi penelitian survei pada organisasi pemerintah.

Data dikumpulkan melalui survei kuesioner berbasis *Google Form*, yang dibatasi khusus bagi pegawai BPKP dengan akun @bpkp.go.id untuk menjamin keabsahan responden. Penyebaran dilakukan melalui mekanisme formal melalui Biro Humas dan Komunikasi BPKP kepada seluruh unit kerja, serta secara mandiri oleh peneliti sehingga responden tidak terkonsentrasi pada satu satuan kerja dan bias yang bersumber dari kesamaan lingkungan kerja dapat ditekan. Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur dengan skala Likert lima poin (1=Sangat Tidak Setuju hingga 5=Sangat Setuju).

Variabel *Risk-Based Internal Audit* (RBIA) diukur sebagai tingkat penerapan pendekatan pengawasan intern berbasis risiko yang mencakup pemahaman tujuan strategis, penilaian risiko, penetapan *audit universe*, integrasi *risk register* dalam rencana audit tahunan, serta pelaporan efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, diadaptasi dari instrumen Abidin (2017). Variabel penerapan TI diukur melalui tingkat penggunaan CAATs, kesiapan infrastruktur, dan kompetensi teknologi auditor, diadaptasi dari Alerman (2025), Umar et al. (2017), dan Jayanti et al. (2025). Variabel objektivitas auditor diukur melalui aspek struktural dan fungsional kebebasan dari intervensi serta konflik kepentingan, diadaptasi dari Suwaidan & Qasim (2010). Variabel efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan diukur berdasarkan cakupan pemeriksaan pada area kepatuhan dan pengendalian, kualitas temuan dan rekomendasi, serta dampak nyata bagi auditee, diadaptasi dari Alzeban & Sawan (2015) dan Cohen & Sayag (2010).

Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan SmartPLS 4.1.1.8, mencakup: (1) evaluasi model pengukuran (*outer model*) melalui uji reliabilitas indikator, uji reliabilitas internal (*Cronbach's alpha* dan *composite reliability*), validitas konvergen (AVE), dan validitas diskriminan

(*Fornell-Larcker Criterion* dan HTMT); (2) evaluasi model struktural (*inner model*) melalui koefisien jalur, R^2 , dan signifikansi hipotesis melalui *one-tailed bootstrapping*; serta (3) uji daya prediksi model melalui PLSpredict. Sebelum pengumpulan data utama, hasil kuisioner 30 responden diuji pilot test dan atas 41 indikator awal, 14 dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria, sehingga analisis utama menggunakan 27 indikator.

Hasil Dan Pembahasan

Evaluasi Model Pengukuran

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen dan *Indicator Loadings*

Variabel	Kode	<i>Outer Loading</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Keterangan
Efektivitas Audit Internal untuk Pencegahan dan Deteksi Kecurangan	EAI2	0,570	0,540	Valid
	EAI4	0,718		
	EAI6	0,812		
	EAI8	0,811		
	EAI9	0,757		
	EAI10	0,733		
	EAI11	0,716		
Objektivitas Auditor	OA1	0,685	0,523	Valid
	OA2	0,779		
	OA3	0,700		
	OA5	0,724		
Penerapan Teknologi Informasi	PTI1	0,771	0,642	Valid
	PTI2	0,843		
	PTI3	0,813		
	PTI4	0,869		
	PTI5	0,732		
	PTI6	0,772		
<i>Risk-Based Internal Audit</i>	RBIA1	0,707	0,542	Valid
	RBIA2	0,800		
	RBIA7	0,680		
	RBIA8	0,757		
	RBIA9	0,728		
	RBIA10	0,716		
	RBIA11	0,796		
	RBIA14	0,772		
	RBIA15	0,733		
	RBIA16	0,662		

Sumber: Data penelitian (2026)

Hasil evaluasi model pengukuran ($n=143$) menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki *outer loading* > 0,708. Indikator pada rentang 0,40 s.d. 0,70 tetap dipertahankan karena masih berkontribusi memadai terhadap konstruk (Hair Jr. et al., 2022). Validitas konvergen juga terpenuhi dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh konstruk yang telah melebihi 0,50.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan

<i>Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)</i>					<i>Fornell-Larcker Criterion</i>			
	EAI	OA	PTI	RBIA	EAI	OA	PTI	RBIA
EAI					0.735			
OA	0.794				0.620	0.723		

PTI	0.585	0.485		0.527	0.383	0.801	
RBIA	0.738	0.806	0.709	0.670	0.637	0.636	0.736

Sumber: Data penelitian (2026)

Uji validitas diskriminan menggunakan Fornell-Larcker Criterion menunjukkan bahwa akar kuadrat AVE setiap konstruk melebihi korelasi antarkonstruk. Nilai HTMT antarvariabel berada di bawah 0,85, mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk dapat dibedakan secara empiris.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	Keterangan
EAI	0.856	0.891	Reliabel
OA	0.695	0.814	Reliabel
PTI	0.888	0.915	Reliabel
RBIA	0.906	0.922	Reliabel

Sumber: Data penelitian (2026)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,80, sedangkan nilai *Cronbach's alpha* berkisar antara 0,695 (OA) hingga 0,906 (RBIA), yang seluruhnya memenuhi batas minimum yang disyaratkan. Konstruk OA memiliki nilai *Cronbach's alpha* sebesar 0,695, yang tetap diterima karena berada pada rentang memadai 0,60 s.d. 0,70 (Hair Jr. et al., 2022). Mengingat sifatnya yang konservatif, penilaian reliabilitas internal tidak hanya bertumpu pada *Cronbach's alpha* tetapi juga didukung oleh nilai *Composite Reliability*. Berdasarkan hal tersebut seluruh konstruk dinyatakan reliabel dan layak untuk analisis tahap selanjutnya.

Evaluasi Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Original Sample (β)	T-Statistics	P-Values	Keterangan
RBIA → EAI	0,342	3,071	0,001	Diterima
PTI → EAI	0,183	1,895	0,029	Diterima
OA → EAI	0,333	4,109	0,000	Diterima

Sumber: Data penelitian (2026)

Hasil evaluasi model struktural menghasilkan nilai $R^2=0,531$ yang menunjukkan variabel RBIA, penerapan TI, dan objektivitas auditor secara bersama-sama mampu menjelaskan 53,1% variasi efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Sisanya sebesar 46,9% berkaitan dengan faktor lain di luar model. Oleh sebab itu, hasil ini lebih tepat dibaca sebagai penegasan bahwa ketiga variabel merupakan penjelas utama, bukan penjelas tunggal.

Pengaruh RBIA terhadap Efektivitas Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

RBIA terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan ($\beta=0,342$; $t=3,071$; $p=0,001$), sehingga H1 diterima. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan penerapan RBIA diikuti oleh prosedur audit yang lebih relevan, fokus pengujian yang lebih tajam pada area berisiko tinggi, serta rekomendasi yang lebih mampu menutup celah penyimpangan.

Hasil ini konsisten dengan Teori Keagenan yang memandang audit berbasis risiko sebagai mekanisme *monitoring* yang meningkatkan relevansi informasi audit bagi *principal*, serta dengan *Three Lines Model* yang menempatkan BPKP sebagai lini ketiga penyedia *assurance* berbasis peta risiko. Ardianingsih & Payamta (2022) menemukan bahwa RBIA membantu auditor memahami proses bisnis, mengidentifikasi risiko pada area kunci, dan menyusun program kerja audit tahunan berdasarkan profil risiko sehingga rekomendasi perbaikan menjadi lebih

tepat. Lois et al. (2021) menunjukkan bahwa pelatihan manajemen risiko, peran aktif komite audit, dan formalisasi sistem manajemen risiko berhubungan positif dengan implementasi RBIA.

Signifikansi RBIA di lingkungan BPKP juga didorong oleh karakteristik kelembagaan yang khas, yaitu mandat pengawasan yang luas, lingkup lintas sektor, dan fungsi pembinaan yang simultan. Selain itu, cakupan pengawasan meliputi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara, sementara jumlah auditor dan hari penugasan terbatas. Kondisi tersebut mendorong penentuan prioritas menjadi faktor yang menentukan hasil pengawasan. Audit yang dialokasikan secara merata menghasilkan cakupan yang luas tetapi dangkal, sedangkan audit yang diarahkan pada area dengan eksposur risiko tinggi memungkinkan pendalaman pada titik yang benar-benar rawan. Pendekatan RBIA pada audit internal BPKP dapat mengalokasikan kapasitas pemeriksaan secara lebih tepat sasaran, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kecurangan sejak perencanaan hingga pelaporan (Amran et al., 2023; Mahsun et al., 2021), dan mendorong peningkatan kualitas *assurance* kepada pemangku kepentingan.

Temuan tersebut membawa implikasi bagi pengembangan teori audit internal sektor publik. Efektivitas audit internal selama ini banyak dijelaskan melalui atribut struktural seperti independensi organisasi, dukungan manajemen, dan kecukupan sumber daya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara sumber daya tersebut dialokasikan merupakan penjelas yang tidak kalah penting. Dengan kata lain, kualitas *monitoring* dalam Teori Keagenan tidak ditentukan oleh besar kecilnya kapasitas pengawasan semata, tetapi juga oleh sejauh mana kapasitas tersebut diarahkan pada sumber asimetri informasi yang paling material bagi *principal*.

Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

Penerapan TI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan ($\beta=0,183$; $t=1,895$; $p=0,029$), sehingga H2 diterima. Besaran koefisien yang relatif lebih kecil dibandingkan RBIA dan objektivitas auditor mencerminkan sifat TI sebagai faktor pendukung (*enabling factor*), bukan faktor tunggal penentu efektivitas.

Temuan ini konsisten dengan perspektif TTF yaitu ketika teknologi yang digunakan auditor BPKP benar-benar mendukung kebutuhan tugas audit seperti pelacakan bukti elektronik, analisis populasi data, dan identifikasi anomali, maka efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi *fraud* meningkat. Hasil ini sejalan dengan Alkebsi & Aziz (2017) yang menemukan hubungan positif signifikan antara penggunaan TI dan efektivitas audit internal. Eulerich et al. (2023) menambahkan bahwa teknik audit berbasis teknologi meningkatkan jumlah faktor risiko yang dapat diidentifikasi dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Temuan ini sekaligus memperkaya penerapan *Task-Technology Fit* pada sektor publik. TTF selama ini banyak diuji pada organisasi bisnis yang proses kerjanya relatif seragam dan sebagian besar terekam dalam sistem. Besaran pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan variabel lain dapat dijelaskan oleh heterogenitas objek pengawasan BPKP yang sebagian bukti bersifat elektronik dan dapat dianalisis melalui sistem informasi, namun sebagian lainnya bersifat administratif, fisik, atau berbasis konfirmasi lapangan sehingga tidak sepenuhnya memerlukan teknologi canggih. Karena tingkat kesesuaian teknologi berbeda antarpengawasan, pengaruh agregat teknologi terhadap efektivitas audit menjadi lebih kecil dibandingkan determinan yang berlaku pada semua jenis penugasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa TI lebih tepat dipahami sebagai *enabling factor* yang memberikan manfaat optimal pada penugasan dengan karakteristik data yang sesuai. Hal ini sejalan dengan temuan Han et al. (2016) yang menyatakan bahwa TI merupakan *double-edged sword* yang dapat memperkuat audit dalam kondisi yang tepat, tetapi menimbulkan risiko baru apabila kualitas data atau kompetensi auditor belum memadai.

Implikasi teoretisnya, pada organisasi dengan tugas yang heterogen, TTF sebaiknya diuji pada tingkat penugasan dan bukan pada tingkat organisasi agar variasi kesesuaian yang sesungguhnya terjadi tidak teredam dalam nilai rata-rata. Bagi BPKP, hal tersebut berarti manfaat teknologi audit akan lebih terlihat jika pemanfaatannya dipetakan menurut jenis penugasan dan tidak diseragamkan pada seluruh penugasan.

Pengaruh Objektivitas Auditor terhadap Efektivitas Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi Kecurangan

Objektivitas auditor terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan ($\beta=0,333$; $t=4,109$; $p=0,000$), sehingga H3 diterima. Nilai t-statistik yang paling tinggi di antara ketiga variabel mengindikasikan bahwa objektivitas memiliki hubungan statistik yang paling kuat terhadap efektivitas audit internal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan di BPKP.

Temuan ini sejalan dengan Teori Keagenan dimana objektivitas memperkuat kredibilitas fungsi *monitoring* karena informasi audit yang bebas dari keberpihakan menurunkan asimetri informasi dan menekan perilaku oportunistik pihak yang diaudit. Gamayuni (2018) berpendapat bahwa objektivitas auditor internal memengaruhi efektivitas fungsi audit internal, bahkan Suwaidan & Qasim (2010) menyatakan bahwa auditor eksternal sangat mempertimbangkan objektivitas dalam mengandalkan auditor internal. Dalam kerangka *Three Lines Model*, objektivitas merupakan prasyarat kelembagaan agar *assurance* yang diberikan BPKP sebagai lini ketiga tidak tereduksi menjadi formalitas administratif.

Fungsi pembinaan pada desain kelembagaan BPKP menempatkan auditor sebagai pihak yang membantu entitas memperbaiki tata kelola, sedangkan fungsi *assurance* menuntut auditor menilai entitas yang sama. Auditor yang sebelumnya terlibat dalam perbaikan sistem berpotensi menilai hasil kerjanya sendiri, sementara hubungan kerja yang berlangsung lama menumbuhkan kedekatan yang menyulitkan penyampaian temuan yang tidak menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, objektivitas berfungsi sebagai penyangga yang menjaga agar peran pembinaan tidak menggerus ketajaman peran *assurance*. Hal tersebut menjelaskan mengapa objektivitas menunjukkan hubungan paling stabil dengan efektivitas audit internal dalam model penelitian ini.

Temuan tersebut sejalan dengan Lonto et al. (2023) yang menyatakan bahwa independensi fungsi audit internal dapat meningkatkan kualitas audit, yang selanjutnya memperkuat efektivitas audit internal dalam pencegahan kecurangan. Selain itu, Razali (2020) menemukan bahwa ancaman objektivitas berdampak negatif terhadap kualitas penilaian risiko auditor internal. Bagi pengembangan teori, temuan ini menegaskan bahwa objektivitas perlu diperlakukan sebagai kondisi kelembagaan, bukan semata sifat individual auditor. *Three Lines Model* mensyaratkan lini ketiga yang independen, tetapi pada organisasi bermandat ganda independensi struktural saja belum memadai. Diperlukan pengaturan penugasan yang memisahkan peran pembinaan dari peran *assurance* atas objek yang sama agar posisi lini ketiga tidak kehilangan maknanya.

Uji Daya Prediksi Model (PLSpredict)

Tabel 5. Hasil Uji Daya Prediksi Model

Indikator	$Q^2_{predict}$	PLS-SEM RMSE	LM RMSE
EAI2	0,341	0,475	0,489
EAI4	0,249	0,582	0,614
EAI6	0,288	0,630	0,706
EAI8	0,173	0,734	0,788
EAI9	0,193	0,628	0,706
EAI10	0,239	0,670	0,763
EAI11	0,207	0,711	0,800

Sumber: Data penelitian (2026)

Hasil PLSpredict menunjukkan bahwa seluruh indikator konstruk endogen EAI memiliki nilai $Q^2_{predict}$ positif yang mengindikasikan adanya relevansi prediktif. Perbandingan RMSE model PLS-SEM dengan linear model (LM) menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki tingkat kesalahan prediksi PLS-SEM lebih rendah dibandingkan LM, sehingga model dikategorikan memiliki daya prediksi yang baik (Hair Jr. et al., 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa RBIA, penerapan teknologi informasi, dan objektivitas auditor masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal BPKP dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 53,1% variasi efektivitas audit internal dengan daya prediksi yang baik. Dalam perspektif Teori Keagenan, ketiganya bekerja sebagai mekanisme *monitoring* yang saling melengkapi dengan RBIA mengarahkan audit pada area paling strategis dan rawan, penerapan TI memperkuat proses tersebut melalui analisis data, bukti elektronik, dan identifikasi anomali sedangkan objektivitas auditor memastikan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tetap kredibel. Dalam

kerangka *Three Lines Model*, sinergi ini menegaskan peran BPKP sebagai lini ketiga yang memberikan *assurance* independen dan bernilai tambah, bukan sekadar memenuhi formalitas pengawasan.

Efektivitas pencegahan dan deteksi kecurangan merupakan hasil dari tiga elemen yang berbeda sifatnya, yaitu ketepatan sasaran pengawasan, jangkauan bukti yang dapat diuji, dan kredibilitas penilaian auditor. Ketiganya saling melengkapi dan tidak saling menggantikan. Teknologi audit yang maju tidak menutupi perencanaan yang tidak berbasis risiko, sementara perencanaan yang baik kehilangan artinya jika temuan tidak disampaikan secara objektif. Pemahaman ini memperluas Teori Keagenan dengan menempatkan kualitas *monitoring* sebagai fungsi dari ketepatan sasaran dan kredibilitas informasi, menajamkan *Three Lines Model* dengan menunjukkan bahwa independensi struktural belum memadai bagi organisasi bermandat ganda, serta memperluas jangkauan *Task-Technology Fit* ke ranah pengawasan pemerintahan dengan catatan bahwa kesesuaian teknologi bersifat spesifik menurut jenis penugasan.

Secara kebijakan, hasil penelitian mengarah pada tiga langkah yang dapat ditempuh BPKP. Pertama, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebaiknya bertumpu pada *risk register* dan peta risiko kecurangan yang diperbarui secara berkala sehingga alokasi sumber daya penugasan mengikuti tingkat eksposur risiko dan bukan pola penugasan tahun sebelumnya. Kedua, investasi teknologi audit perlu diarahkan pada jenis penugasan yang datanya tersedia secara elektronik, disertai standardisasi prosedur analisis data dan peningkatan kompetensi analitik auditor agar perangkat yang tersedia benar-benar digunakan dalam pengujian. Ketiga, perlindungan objektivitas perlu dituangkan dalam pengaturan penugasan, misalnya melalui pemisahan auditor yang menjalankan fungsi pembinaan dari auditor yang melaksanakan *assurance* atas entitas yang sama, pembatasan masa penugasan pada satu entitas, serta penyediaan saluran pelaporan atas tekanan yang dihadapi auditor selama penugasan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang sekaligus membuka arah penelitian selanjutnya. Pertama, model masih menyisakan 46,9% variasi yang belum terjelaskan, sehingga penelitian mendatang perlu menambahkan variabel lain agar mendapatkan simpulan yang lebih komprehensif. Kedua, eliminasi 14 dari 41 indikator awal pada tahap *pilot test* menyebabkan cakupan konstruk menjadi lebih ringkas dari rancangan awal sehingga penelitian mendatang perlu mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih luas. Ketiga, desain penelitian bersifat *cross-sectional* sehingga hubungan antarvariabel lebih tepat dipahami sebagai hubungan empiris pada satu titik waktu, bukan sebagai bukti kausalitas longitudinal. Keempat, penggunaan *convenience sampling* dan instrumen swalapor membatasi generalisasi hasil serta menyisakan kemungkinan *common method bias*, sehingga penelitian mendatang disarankan memadukan data survei dengan data arsip seperti jumlah dan nilai temuan atau tingkat penyelesaian tindak lanjut.

Daftar Pustaka

- Abidin, N. H. Z. (2017). Factors influencing the implementation of risk-based auditing. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 361–375. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2016-0118>
- ACFE. (2024). Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations. Association of Certified Fraud Examiners.
- Alerman, A. A. (2025). IT audit as a catalyst for effective judicial accounting in preventing government financial fraud. *EDPACS*. <https://doi.org/10.1080/07366981.2025.2524943>
- Alkebsi, M., & Aziz, K. A. (2017). Information Technology Usage, Top Management Support and Internal Audit Effectiveness. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8(Special Issue), 123–132. <https://doi.org/10.17576/ajag-2017-08si-11>
- Alqaraleh, M. H., Almari, M. O. S., Ali, B. J. A., & Oudat, M. S. (2022). The Mediating Role of Organizational Culture on the Relationship Between Information Technology and Internal Audit Effectiveness. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(1), 8–18. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i1p1>
- Alzeban, A., & Sawan, N. (2015). The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 61–71. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2015.02.005>
- Amran, N. A., Malek, M., Ismail, M. S., & Nor, M. N. M. (2023). A Review on Risk-Based Audit Approach: Malaysian Public Sector's Perspective. *Ipn Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management*, 13(2). <https://doi.org/10.58458/ipnj.v13.02.05.0096>
- Ardianingsih, A., & Payamta, P. (2022). Analysis Of the Effectiveness of Risk-Based Internal Audit Implementation: A Case Study. *Quality - Access to Success*, 23(190), 77–84. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.09>

- Atmanegara, A. W., Erlina, Muda, I., & Adnans, A. A. (2021). Can the Risk Management Implementation Intensify the Internal Auditor Expertise Finding Risk in Local Government? *Webology*, 18(Special Issue), 646–653. <https://doi.org/10.14704/WEB/V18SI05/WEB18252>
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*.
- Cohen, A., & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. *Australian Accounting Review*, 20(3), 296–307. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00092.x>
- Eulerich, M., Masli, A., Pickerd, J., & Wood, D. A. (2023). The Impact of Audit Technology on Audit Task Outcomes: Evidence for Technology-Based Audit Techniques*. *Contemporary Accounting Research*, 40(2), 981–1012. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12847>
- Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3013>
- Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. In *Int. J. Economic Policy in Emerging Economies* (Vol. 11, Number 3).
- Hair Jr., J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Third Edition* (3rd Edition). SAGE.
- Han, S., Rezaee, Z., Xue, L., & Zhang, J. H. (2016). The association between information technology investments and audit risk. *Journal of Information Systems*, 30(1), 93–116. <https://doi.org/10.2308/isyss-51317>
- Harahap, A. J. S., & Erlina. (2024). EVALUATING THE IMPACT OF RISK MANAGEMENT AND RISK-BASED INTERNAL AUDIT ON FRAUD DETECTION IN LOCAL GOVERNMENTS. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 653–664. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.50](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.50)
- Jayanti, C., Slamet, C. A., & Handoko, B. L. (2025). The impact of CAATS on financial auditor task effectiveness, moderated by computer literacy. *Multidisciplinary Science Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2026167>
- Lois, P., Drogalas, G., Nerantzidis, M., Georgiou, I., & Gkampeta, E. (2021). Risk-based internal audit: factors related to its implementation. *Corporate Governance*, 21(4), 645–662. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CG-08-2020-0316>
- Lonto, M. P., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Prihatiningtias, Y. W. (2023). The Effectiveness of Internal Audit for Fraud Prevention. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(3), 171–190. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i3.11>
- Mahdi, S. A. R., Nurkholis, Baridwan, Z., & Prihatiningtias, Y. W. (2024). THE IMPACT OF THE GRABBING HAND ON DETERMINANTS OF AUDIT QUALITY: EVIDENCE FROM GOVERNMENT EXTERNAL AUDITORS, INDONESIA. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 16(1), 547–572. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202416125>
- Mahsun, M., Mohamed, N., Yusuf, S. N. S., & Yuhertiana, I. (2021). Investigating Fraud Risks Assessment Practices in Public Sector Audits. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 16(1), 183–205. <https://doi.org/10.24191/apmaj.v16i1-08>
- Marikyan, D., & Papagiannidis, S. (2023). *Task-Technology Fit: a Review*. TheoryHub Book. <http://open.ncl.ac.uk>
- Mokhtar, N., Ismail, S., & Ahmad, H. (2024). Benefits and Challenges of Digital Audit Implementation in the Malaysian Public Sector: Evidence From the Accountant General's Department of Malaysia. *Ipn Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management*, 14(1). <https://doi.org/10.58458/ipnj.v.14.01.01.0099>
- Muin, A. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2025).
- Rahardyan, T. M., Bakri, M. R., Susilo, C. H., & Putri, S. A. S. T. (2025). *Survei Fraud Indonesia 2025*.
- Razali, F. M. (2020). Examining Types of Audit Judgment and Objectivity Threat: Empirical Findings From Public and Private Sector Internal Auditors in Malaysia. *Indonesian Journal of Economics Social and Humanities*, 2(2), 91–104. <https://doi.org/10.31258/ijesh.2.2.91-104>
- Sofyan, R. M. M., & Purnamasari, P. (2025). Pengaruh Independensi Auditor Dan Teknologi E-Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Bandung Conference Series Accountancy*, 5(1), 323–332. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v5i1.16337>

- Spies, R., Grobbelaar, S., & Botha, A. (2020). A Scoping Review of the Application of the Task-Technology Fit Theory. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12066 LNCS, 397–408. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44999-5_33
- Suwaidan, M. S., & Qasim, A. (2010). External auditors' reliance on internal auditors and its impact on audit fees: An empirical investigation. *Managerial Auditing Journal*, 25(6), 509–525. <https://doi.org/10.1108/02686901011054845>
- The Institute of Internal Auditor. (2020). *MODEL TIGA LINI IIA 2020 Pembaharuan dari Model Pertahanan Tiga Lini*.
- The Institute of Internal Auditors. (2017). *Implementation Guide 1120*.
- The Institute of Internal Auditors. (2024). *The Global Internal Audit Standards*.
- Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025*. www.transparency.org
- Umar, M., Sitorus, S. M., Surya, R. L., Shauki, E. R., & Diyanti, V. (2017). Pressure, Dysfunctional Behavior, Fraud Detection and Role of Information Technology in the Audit Process. In *AABFJ* (Vol. 11, Number 4).